

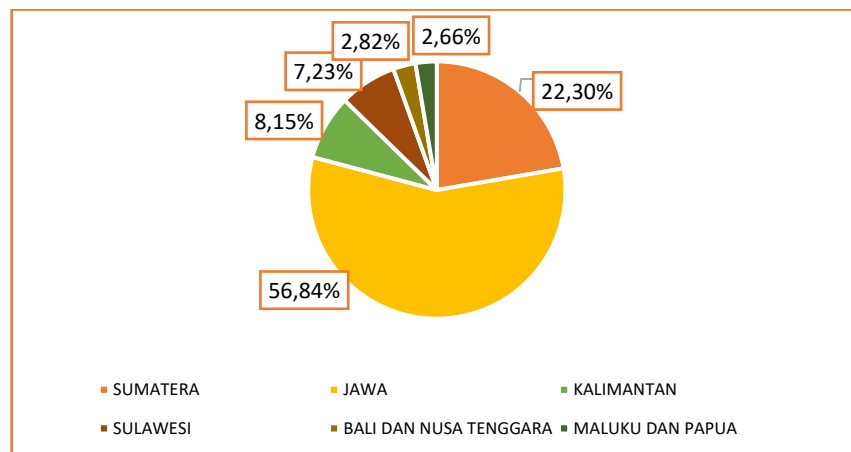
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menilai capaian pembangunan suatu wilayah. Melalui pertumbuhan ekonomi, dapat diketahui kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan kapasitas produksinya untuk menghasilkan barang dan jasa secara berkesinambungan. Dalam kerangka pembangunan regional, pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dimaknai sebagai peningkatan output secara agregat, melainkan juga sebagai proses yang mencerminkan perubahan struktur ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kemampuan wilayah dalam menarik investasi dan memperluas kesempatan kerja (Rodríguez-Pose, 2018). Oleh karena itu, kajian mengenai pertumbuhan ekonomi menjadi dasar yang relevan dalam perumusan maupun evaluasi kebijakan pembangunan wilayah.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang relatif stabil dalam jangka panjang, tetapi masyarakat di seluruh wilayah belum merasakan pencapaian tersebut secara merata. Menurut Santoso & Anggraini (2024) perbedaan kondisi geografis, perbedaan struktur ekonomi, tingkat urbanisasi, serta konsentrasi kegiatan industri dan jasa mendorong munculnya ketimpangan spasial dalam pertumbuhan dan kinerja ekonomi antarwilayah. Ketimpangan tersebut tercermin dari perbedaan kontribusi ekonomi masing-masing wilayah, terutama apabila dilihat berdasarkan pembagian wilayah kepulauan di Indonesia.



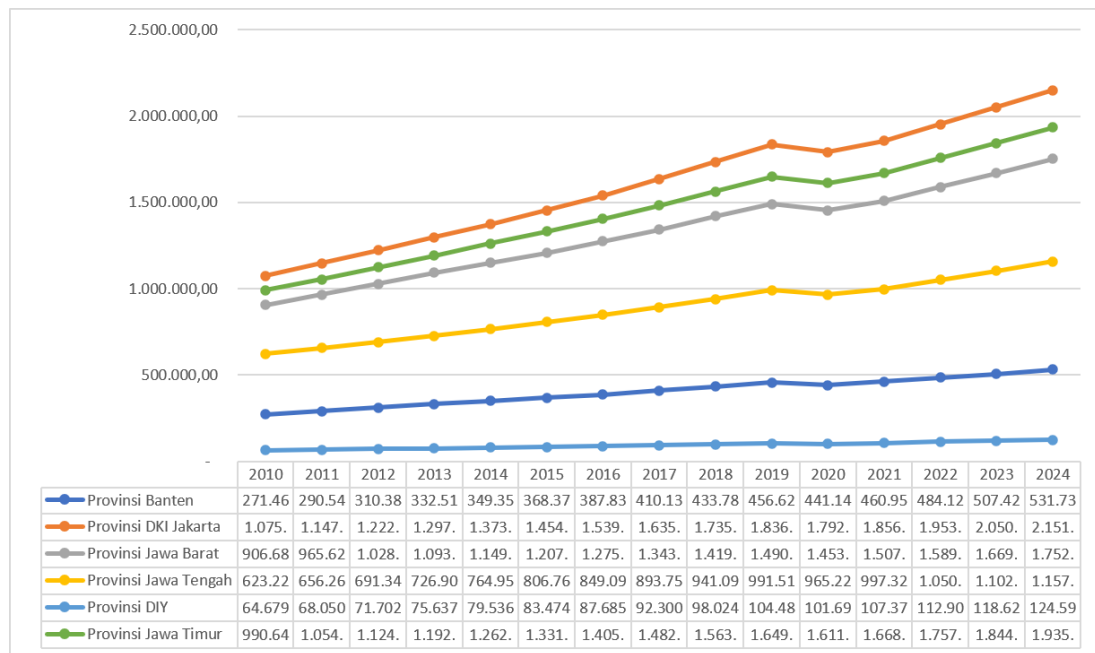
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 1. 1 Kontribusi PDRB menurut Wilayah 2024

Perekonomian Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (2024), masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dibuktikan melalui kontribusi wilayah Jawa yang menyumbang 56,84 persen dari total perekonomian Indonesia. Sumatera menempati urutan kedua dengan andil 22,30 persen, diikuti Kalimantan menyumbang 8,15 persen, kemudian Sulawesi menyumbang 7,23 persen, wilayah Bali dan Nusa Tenggara 2,82 persen, dan wilayah Maluku dan Papua andil sebesar 2,66 persen. Upaya pemerataan pembangunan ekonomi harus menjadi fokus serius pemerintah.

Data kontribusi PDRB menurut wilayah menunjukkan bahwa Pulau Jawa merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB nasional dibandingkan wilayah-wilayah lainnya. Namun, tingginya kontribusi tersebut tidak serta-merta mencerminkan kondisi ekonomi yang merata di seluruh wilayah Pulau Jawa, karena di dalamnya masih berpotensi terdapat ketimpangan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, analisis ekonomi perlu diturunkan ke tingkat provinsi dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebagai indikator kinerja ekonomi riil. PDRB ADHK digunakan karena telah menghilangkan pengaruh perubahan harga atau inflasi, sehingga

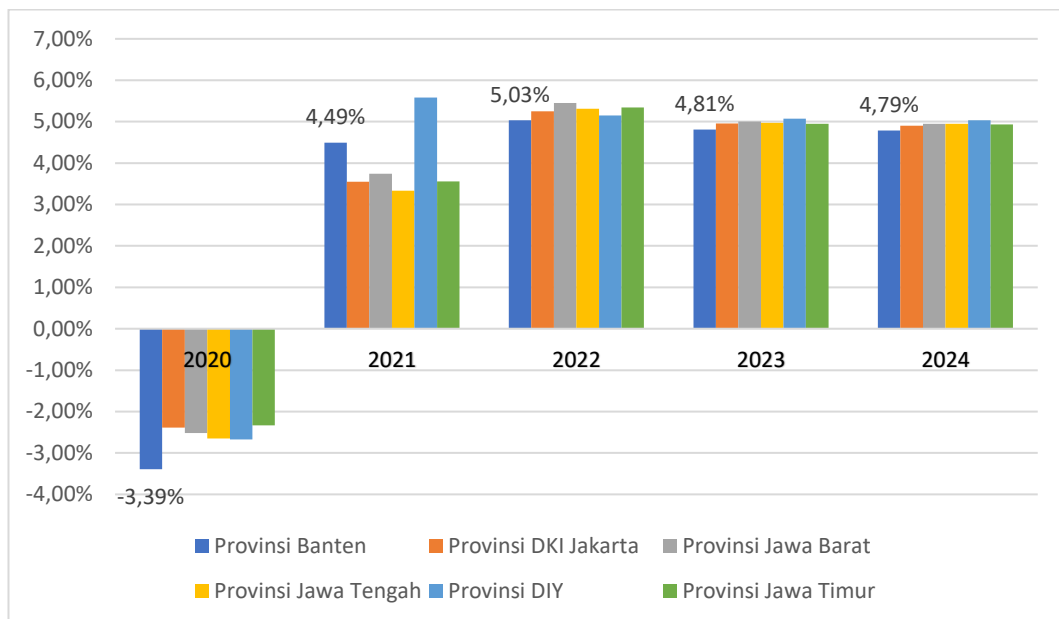
mampu memberikan ukuran pertumbuhan ekonomi yang lebih akurat dan memungkinkan perbandingan kinerja ekonomi dilakukan secara lebih objektif, baik antarperiode maupun antarwilayah (Fatimah & Rahayu, 2023).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 1. 2 PDRB ADHK Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2024

Gambar 1.2 menunjukkan perkembangan PDRB ADHK 2010 dari tahun 2010-2024 dengan perkembangan paling tinggi ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian di Pulau Jawa bahkan nasional. Perkembangan PDRB tertinggi kedua ditempati oleh Provinsi Jawa Timur dilanjutkan oleh Provinsi Jawa Barat dengan posisi ketiga. Pada urutan keempat ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah. Dua urutan terakhir dari yang tertinggi ditempati oleh Provinsi Banten serta provinsi dengan kontribusi PDRB paling rendah di Pulau Jawa sepanjang tahun 2010- 2024 ditempati oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Provinsi Banten dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih menjadi dua provinsi terendah kontribusi PDRB ADHK selama tahun 2010-2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 1. 3 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Provinsi di Pulau Jawa 2020-2024

Gambar 1.3 di atas menunjukkan laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 provinsi di Pulau Jawa selama periode 2020-2024 mengalami fluktuasi. Laju pertumbuhan PDRB ADHK ini menunjukkan Provinsi Banten menempati urutan terendah dalam laju pertumbuhan PDRB ADHK, meskipun pada tahun 2021 menunjukkan laju pertumbuhan tertinggi kedua di Pulau Jawa. Namun hal itu tidak membuat pada tahun selanjutnya Provinsi Banten menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya, Provinsi Banten masih menempati urutan terendah pada laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 dari provinsi yang ada di Pulau Jawa.

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah. Beragamnya kondisi ekonomi yang dialami oleh berbagai provinsi di Pulau Jawa juga membuat beragamnya kebijakan-kebijakan yang direalisasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, tidak terkecuali Provinsi Banten (Yunitasari *et al.*, 2023). Provinsi Banten telah menetapkan pembentukan

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung yang berlokasi di Kabupaten Pandeglang sebagai instrumen kebijakan strategis guna mendorong aktivitas ekonomi, menarik investasi, menyerap tenaga kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah (Gustiani & Agustino, 2025). Keberadaan KEK ini sekaligus memberikan peluang untuk mengkaji secara empiris sejauh mana kebijakan pembangunan berbasis kawasan mampu memengaruhi dinamika perekonomian suatu wilayah.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan dengan batasan geografis tertentu yang diberikan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal oleh pemerintah sebagai instrumen percepatan pertumbuhan ekonomi. Insentif tersebut meliputi fasilitas perpajakan dan kemudahan perizinan yang ditujukan untuk menarik investasi dan mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah. Meskipun secara konseptual KEK dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan wilayah, efektivitasnya dalam mendorong kinerja ekonomi regional, khususnya di wilayah sekitar KEK, masih menunjukkan dinamika yang beragam (Suryani & Febriani, 2019). Hal ini menjadi relevan mengingat KEK tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan karakteristik sektor dan potensi yang berbeda, termasuk di Pulau Jawa sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional.

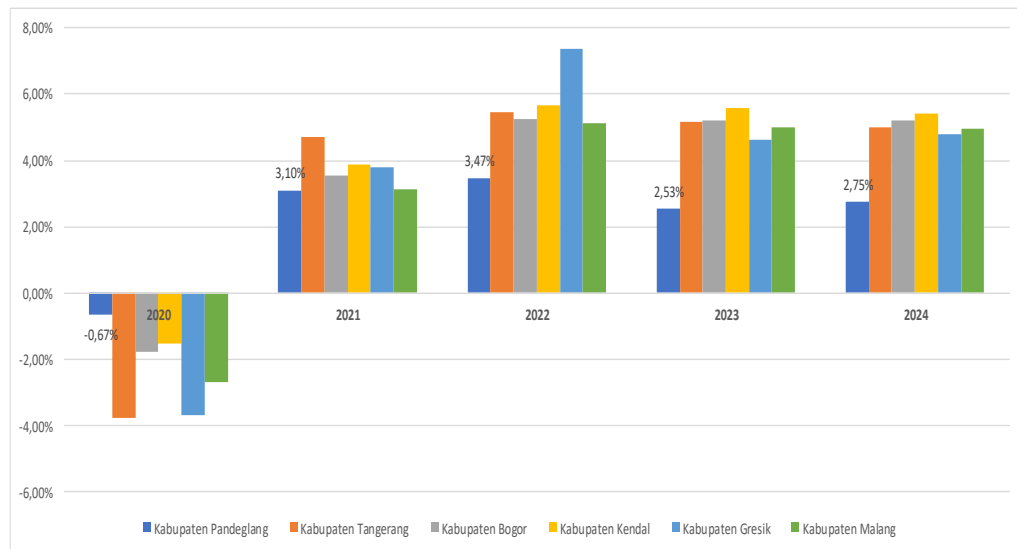
Tabel 1. 1 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Jawa

No	Nama KEK	Lokasi	Sektor	Beroperasi	Landasan Hukum
1	KEK Tanjung Lesung	Pandeglang , Banten	Pariwisata	24 Februari 2015	PP No. 26 Tahun 2012
2	KEK Edukasi, Teknologi, dan	Tangerang, Banten	Jasa lainnya	-	PP No. 36 Tahun 2024

No	Nama KEK	Lokasi	Sektor	Beroperasi	Landasan Hukum
Kesehatan Internasional					
3	KEK Lido	Bogor, Jawa Barat	Pariwisata	08 November 2022	PP No. 69 Tahun 2021
4	KEK Kendal	Kendal, Jawa Tengah	Manufaktur	24 Mei 2021	PP No. 85 Tahun 2019
5	KEK Gresik	Gresik, Jawa Timur	Manufaktur	08 November 2022	PP No. 71 Tahun 2021
6	KEK Singhasari	Malang, Jawa Timur	Digital	08 November 2022	PP No. 68 Tahun 2019

Sumber: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 2024

Distribusi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Jawa mencerminkan adanya ketimpangan strategi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Mengesampingkan DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi utama, terlihat jelas bahwa provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi cenderung memiliki lebih dari satu KEK. Sebaliknya, wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat biasanya hanya memiliki satu KEK, atau bahkan tidak sama sekali. Dalam konteks ini, Provinsi Banten menjadi objek penelitian yang sangat menarik untuk dikaji. Pasalnya, meskipun Banten sudah memiliki instrumen kebijakan KEK, pertumbuhan ekonomi masih tertinggal dibandingkan provinsi-provinsi tetangga di Pulau Jawa.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 1. 4 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten yang memiliki KEK

Laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 dari gambar 1.4 juga diperoleh kesimpulan bahwa pertumbuhan di Provinsi Banten masih mengalami pertumbuhan yang beragam di masing-masing kabupaten. Kabupaten Pandeglang selama tahun 2020-2024 menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih rendah dibanding kabupaten lain meskipun di tahun 2020 menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding kabupaten-kabupaten lain. Hal ini mengingat Kabupaten Pandeglang sebagai lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung dan laju pertumbuhan di kabupaten sekitar.

PDRB digunakan sebagai indikator utama dalam menilai tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena mampu mencerminkan nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi. Namun, dalam konteks pengembangan KEK Tanjung Lesung, penggunaan PDRB secara agregat memiliki keterbatasan dalam menggambarkan pengaruh kawasan secara lebih spesifik. Hal ini karena manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh suatu kawasan tidak selalu tersebar secara merata pada seluruh lapangan usaha. Mengingat KEK Tanjung Lesung dirancang sebagai

kawasan berbasis pariwisata, maka aktivitas ekonomi yang berkembang di dalamnya lebih banyak ditopang oleh sektor jasa dan berbagai kegiatan pendukung pariwisata. Dengan demikian, analisis pada sektor-sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas tersebut dinilai lebih relevan untuk menggambarkan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pengembangan kawasan.

Perkembangan suatu kawasan wisata pada umumnya akan mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap berbagai layanan penunjang, seperti akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, transportasi, serta jasa-jasa pendukung lainnya. Dalam konteks pengembangan KEK Tanjung Lesung, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor jasa lainnya dipandang sebagai sektor yang paling berpotensi merasakan dampak dari aktivitas kawasan. Hal ini karena ketiga sektor tersebut memiliki hubungan yang erat dengan mobilitas wisatawan, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta berbagai kegiatan ekonomi yang berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah kunjungan wisata dan masuknya investasi ke kawasan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalamnya. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diharapkan mampu mendorong peningkatan aktivitas produksi, ekspansi usaha, dan investasi sehingga menciptakan peluang kerja yang lebih luas. Meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa akan mendorong perusahaan untuk memperluas kapasitas produksinya, yang pada akhirnya meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dari meningkatnya nilai PDRB, tetapi juga diharapkan mampu memberikan dampak

positif terhadap penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Solow (1956), pertumbuhan ekonomi dapat terjadi juga terdapat faktor tenaga kerja.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai salah satu instrumen kebijakan pembangunan regional ini diharapkan mampu berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Keberadaan KEK tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di dalam kawasan itu sendiri, tetapi juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi wilayah di sekitarnya. Dalam perspektif teori kutub pertumbuhan oleh Perroux dalam Wardhana (2024), suatu kawasan strategis dikatakan berhasil apabila mampu menimbulkan efek penyebaran (*spread effect*) yang mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya. Meskipun demikian, pada kondisi tertentu, pengembangan kawasan ekonomi juga berpotensi menimbulkan efek sebaliknya, yaitu *backwash effect*.

Penelitian ini memfokuskan analisis pada interaksi antara Kabupaten Pandeglang sebagai wilayah inti dari lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. Interaksi ini dikaitkan dengan wilayah yang ada di sekitarnya meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kota Serang dalam konteks hubungan kausalitas temporal. Pemilihan wilayah tersebut didasari oleh tingkat keterkaitan yang sangat erat di tingkat Kabupaten Pandeglang. Secara geografis, letak Kabupaten Lebak yang bersebelahan langsung di sisi selatan Kabupaten Pandeglang serta dua kabupaten ini masuk ke dalam wilayah pengembangan di Provinsi Banten yaitu Wilayah Kerja Pembangunan III. Pemilihan Kabupaten Serang dan Kota Serang juga terkait konektivitas dengan Kabupaten Pandeglang yang terhubung oleh Jalan Tol Serang-Panimbang yang menghubungkan

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung dengan Kabupaten Serang dan Kota Serang (Hidayat, 2021).

Perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola hubungan yang terbentuk antara Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan perkembangan ekonomi wilayah dalam deret waktu, terutama yang berkaitan dengan interaksi antara kawasan inti dan daerah di sekitarnya. KEK Tanjung Lesung dirancang sebagai pusat pertumbuhan yang diharapkan mampu mempercepat aktivitas ekonomi, tidak hanya di dalam kawasan itu sendiri, tetapi juga menyebar ke wilayah sekitarnya. Namun demikian, realisasi dampak tersebut tidak selalu bersifat langsung dan seragam, karena karakteristik wilayah yang berbeda dapat menghasilkan respons ekonomi yang beragam.

Kondisi ini memunculkan kebutuhan untuk menelaah apakah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pandeglang sebagai lokasi inti KEK Tanjung Lesung benar-benar mendahului dan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten-kabupaten di sekitarnya, atau justru menunjukkan arah hubungan yang berbeda. Atas dasar itu, penelitian ini dengan judul *“Analisis Hubungan Kausal Temporal Antara Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sekitarnya”* yang berfokus pada pengujian keterkaitan kausal temporal melalui pendekatan uji kausalitas granger menjadi penting untuk menelusuri arah dan pola hubungan ekonomi yang terbentuk, sehingga peran KEK sebagai instrumen pembangunan wilayah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka disusun perumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat hubungan kausalitas granger antara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pandeglang sebagai lokasi inti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK Tanjung Lesung) ke pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya?
2. Apakah terdapat hubungan kausalitas granger antara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pandeglang sebagai lokasi inti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung terhadap penyerapan tenaga kerja di wilayah sekitarnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilaksanakan tentunya memiliki tujuan, demikian pula halnya dengan penelitian yang penulis lakukan juga mempunyai tujuan yaitu:

1. Menganalisis apakah terdapat hubungan kausalitas granger antara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pandeglang sebagai lokasi inti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung ke pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.
2. Menganalisis apakah terdapat hubungan kausalitas granger antara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pandeglang sebagai lokasi inti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung terhadap penyerapan tenaga kerja di wilayah sekitarnya.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ekonomi regional, terutama yang berkaitan dengan penerapan teori kutub pertumbuhan tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dengan menggunakan pendekatan *granger causality*, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami hubungan dinamis berbasis waktu antara pengembangan KEK dan pertumbuhan ekonomi wilayah, baik di tingkat kabupaten lokasi KEK maupun daerah sekitarnya dan juga penyerapan tenaga kerja di wilayah sekitarnya. Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi referensi empiris dalam pengembangan studi-studi selanjutnya yang meneliti interaksi ekonomi antarwilayah.

2. Manfaat Empiris

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung dan pertumbuhan ekonomi wilayah terkait. Menggunakan pendekatan hubungan granger, penelitian ini mampu mengidentifikasi apakah keberadaan KEK Tanjung Lesung berpotensi menimbulkan efek penyebaran (*spread effect*), efek penarikan (*backwash effect*), hubungan timbal balik, atau tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Temuan empiris ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi efektivitas KEK sebagai instrumen pembangunan wilayah.

3. Manfaat Praktis (Kebijakan)

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Informasi mengenai pola hubungan antara KEK Tanjung Lesung dan pertumbuhan ekonomi daerah

sekitarnya dapat digunakan untuk menyusun strategi penguatan keterkaitan antarwilayah, optimalisasi manfaat KEK, serta perumusan kebijakan pendukung agar dampak pembangunan tidak hanya terpusat pada kawasan inti, tetapi juga menyebar secara lebih merata ke wilayah sekitar.